



# **REFORMA AGRARIA**

**Disampaikan pada Diskusi Media**  
**dengan Tema "Reforma Agraria: Atasi Ketimpangan, Kemiskinan dan Konflik"**  
*26 Maret 2017*



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**



## Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang dikaitkan dengan Reforma Agraria Kementerian ATR/BPN

### TANTANGAN PEMERATAAN EKONOMI:

- 1,00 % penduduk mengendalikan 49,30% sumber daya ekonomi Indonesia\*).
- *Gini Ratio* umum posisi Maret 2016 sebesar 0,39%\*\*)
- Korporasi menguasai hampir 60% lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.
- *Gini Ratio* penguasaan tanah adalah sebesar 0,59%.

Sumber:

\*) Laporan kekayaan global yang diterbitkan oleh Credit Suisse

\*\* ) BPS

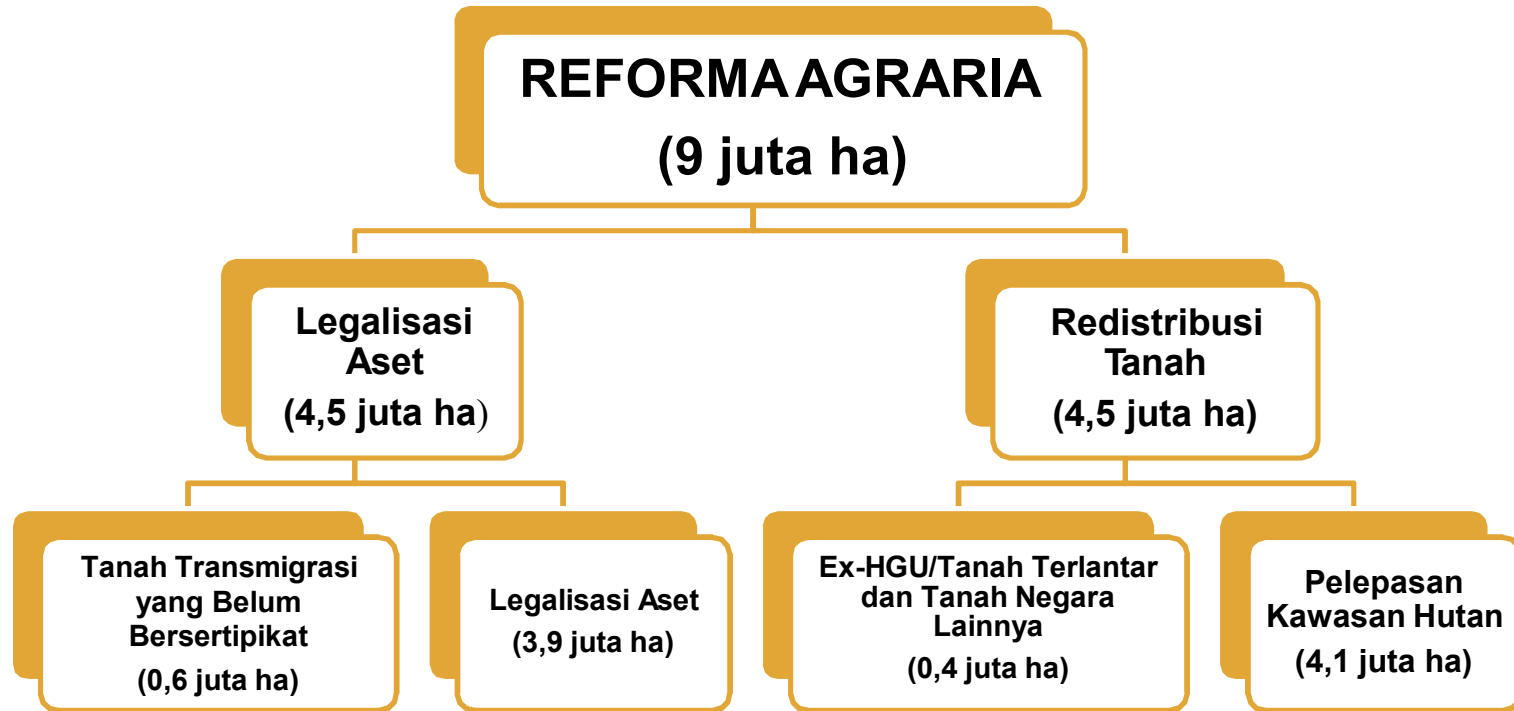
### REFORMA AGRARIA:

- Legalisasi (pemberian sertifikat tanah terhadap 4,5 juta hektar)
- Redistribusi lahan (kawasan hutan sebesar 4,5 juta hektar juga akan dilakukan sertifikasi dan modal/pemberdayaan untuk meningkatkan nilai ekonomi penerimanya)

Dibutuhkan model pemberdayaan/pembiayaan masyarakat yang melibatkan korporasi yang *capable/corporate approach* yang didukung oleh manajemen yang baik, teknologi yang handal, permodalan yang kuat, pemasaran yang luas dan SDM yang kompeten dan berintegrasi.



- Program Reforma Agraria menurut RPJM 2015-2019 terdiri dari unsur legalisasi aset dan redistribusi tanah. Dalam hal ini, aset tersebut pada prinsipnya telah dimiliki oleh masyarakat. Misalnya, perkampungan dalam kawasan hutan.
- Komponen *Fresh land* sangat terbatas kecuali Menteri LHK dapat menetapkan hutan HPK yang belum dikuasai oleh masyarakat untuk didistribusikan.
- Kunci keberhasilan program ini tergantung **kecepatan pelepasan dan penetapan kawasan hutan yang dapat didistribusikan** karena tenggat waktu tinggal 2 tahun dan **adanya kelembagaan pendampingan** penerima manfaat Reforma Agraria (khususnya untuk penerima *Fresh Land*).



Dengan program percepatan, legalisasi aset bisa meningkat dari 3,9 juta ha menjadi angka  $\pm$  8 juta ha atau 22,89 juta bidang



# I. TANAH TRANSMIGRASI

Target Transmigrasi	600.000 ha
Telah Teridentifikasi (telah ditempati transmigran)	306.126 ha
Dalam Proses Koordinasi dengan Kemendes PDDT dan KLHK	293.874 ha

## TELAH TERIDENTIFIKASI 306.126 ha



**Belum ada Pelepasan Kawasan**  
18.707 ha



**Konflik dengan Penduduk di Lokasi**  
29.134 ha



**Belum HPL**  
164.727 ha



**Sudah HPL**  
93.558 ha



**Diperlukan langkah percepatan pelepasan status kawasan hutan terhadap semua lahan transmigrasi agar dapat dilegalisasi.**



**Target**      600.000 ha  
**Realisasi**   31.820 ha (5,3%)

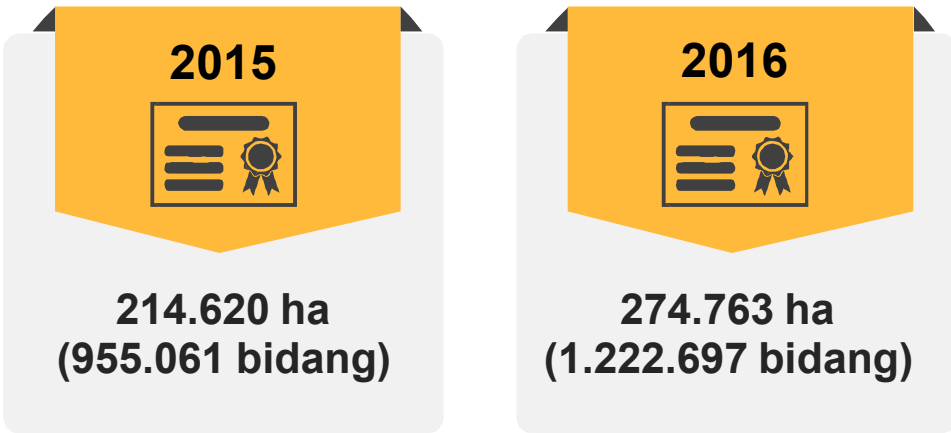


**Target Tahun 2017 : 27.938 ha**  
**Target Tahun 2018 dan 2019 : 540.200 ha**



## II. Legalisasi Aset

**Target RPJM** 3.900.000 ha  
**Realisasi (sd 2016)** 609.349 ha (15,62%)  
**Perkiraan realisasi dengan program percepatan 7,95 juta ha**



**Target 2017 : 1,75 juta ha (5 juta bidang)**  
**Target 2018 : 2,45 juta ha (7 juta bidang) Total**  
**2015-2019 : 7,95 juta ha (22,8 juta bidang)**

Angka realisasi sd 2016  
Asumsi 2017-2019 = 0,35 ha/bidang



**Target** : 400.000 ha  
**Realisasi** : 182.750 ha (45,69 %)



**Target Tahun 2017 : 18.099 ha**  
**Target Tahun 2018 dan 2019 : 199.151 ha**



**Target 4,1 Juta ha**

**Jumlah Luas 2015 - 2016 : 0 hektar (0%)**

**Sisa Target 2017 - 2019 : 4,1 Juta hektar**

\* Terdiri dari Kebun Plasma dari Perkebunan Besar (bagian 20%) untuk rakyat.

Jika Perpres tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan ditandatangani dan Menteri LHK melepaskan status kawasan hutan maka program redistribusi dapat dipercepat, namun diperlukan anggaran tambahan untuk program redistribusi ini, atau sasaran anggaran legalisasi aset sebagian dialihkan untuk mendukung program ini.